

KATALOG : 4601001.3374

# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN

Kota Semarang Tahun 2020



BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA SEMARANG

# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN

**Kota Semarang Tahun 2020**



BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA SEMARANG

# **STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KOTA SEMARANG TAHUN 2020**

**No. Publikasi** : 33740.2125  
**Katalog BPS** : 4601001.3374  
**Ukuran Buku** : 16 cm x 21 cm  
**Jumlah Halaman** : x + 25 halaman

**Naskah :**

Seksi Statistik Sosial  
Badan Pusat Statistik Kota Semarang

**Pengarah** : Fachruddin Tri Ubajani, S.Si, M.Si

**Penanggung Jawab** : Nur Elvira Megasanti S.SE

**Editor** : Nur Elvira Megasanti S.SE

**Penulis** : Retno Dian Ika Wati S.ST, MM

**Gambar Kulit** : Retno Dian Ika Wati S.ST,MM

**Diterbitkan oleh :**

Badan Pusat Statistik Kota Semarang

*Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya*

## **KATA PENGANTAR**

Dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional, pembangunan harus dapat dipastikan berjalan dalam suasana kestabilan. Stabilitas yang dimaksud adalah stabilitas politik dan keamanan negara. Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kota Semarang Tahun 2020 merupakan gambaran kondisi Politik dan Keamanan Kota Semarang yang bersumber dari hasil Survei Politik dan Keamanan tahun 2018-2020.

Dalam publikasi ini tersaji data politik yang bersumber dari KPUD Kota Semarang, Kesbangpol Kota Semarang dan DPRD Kota Semarang dan data keamanan yang bersumber dari Polrestabes Kota Semarang. Selain itu tersaji pula data politik dan keamanan yang berasal dari hasil Podes 2020.

Kepada semua pihak yang telah membantu hingga terwujudnya publikasi ini diucapkan banyak terimakasih. Kritik dan saran dari pemakai data sangat kami harapkan demi kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Semarang , Juni 2020

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA SEMARANG**



**Fachruddin Tri Ubajani, S.Si, M.Si**

# DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Bab I	PENDAHULUAN
	1
1.1.	Latar Belakang
	1
1.2.	Tujuan
	4
1.3.	Ruang Lingkup
	5
Bab II	METODOLOGI
	6
2.1.	Sumber Data
	6
2.2.	Metode Pengumpulan Data
	6
2.3.	Konsep dan Definisi
	7
Bab III	STATISTIK POLITIK
	10
3.1.	Pilkada Terakhir
	10
3.2 .	Susunan Anggota DPRD
	11
3.3 .	Perda yang Dihasilkan DPRD
	13
3.4 .	Organisasi Masyarakat (Ormas)
	14
3.5.	Aparatur Kecamatan dan kelurahan
	15

Bab IV	STATISTIK KEAMANAN	17
4.1.	Jumlah Personil Kepolisian	17
4.2.	Jumlah Kejahatan	18
4.3.	Jenis Kejahatan	19
4.4.	Korban Kejahatan	23
4.5.	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana ( <i>Crime Clock</i> )	25
4.6.	Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana ( <i>Crime Rate</i> )	26
4.7.	Tindak kejahatan yang terjadi di kelurahan selama setahun terakhir	27
4.8.	Kegiatan Warga Kelurahan Untuk Menjaga Kemanan Lingkungan	28
Bab V	PENUTUP	30

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Perolehan Suara Kandidat dalam Pilkada Walikota-Wakil Walikota Semarang Tahun 2015	11
Tabel 3.2 Jumlah Perda dan Perda Inisiatif DPRD Kota Semarang Tahun 2018-2020	14
Tabel 3.3 Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) yang Mendaftar dan Telah Terdaftar Kota Semarang Tahun 2018-2020	15
Tabel 3.4 Jumlah Aparatur Kecamatan menurut Jumlah, Jenis Kelamin dan Tertinggi Tahun 2020	16
Tabel 3.6 Jumlah Aparatur Kelurahan menurut Jumlah, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi Tahun 2018	16
Tabel 4.1 Crime Total, Crime Cleared, dan Crime Rate Tahun 2018-2020	19
Tabel 4.2 Jumlah Korban Kejahatan menurut Jenis Kejahatan di Kota Semarang Tahun 2019-2020	24
Tabel 4.3 Kegiatan Warga Desa/Kelurahan Untuk Menjaga Keamanan Lingkungan Selama Setahun Terakhir dan Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Selama Tahun 2019/2020	29

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 3.1	Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang periode 2019 -2020 menurut Jenis Kelamin dan Asal Partai	13
Gambar 3.2	Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang periode 2019 -2020 menurut Asal Partai	14
Gambar 4.1	Jumlah Personil Polisi menurut Jenis Kelamin, 2018-2020	17
Gambar 4.2	Jumlah Penduduk dan Rasio Polisi Tahun 2018-2020	18
Gambar 4.3	10 Kejahatan Konvensional Terbesar di Kota Semarang Menurut Jenis dan Jumlahnya di Tahun 2018-2020	21
Gambar 4.4	Kejahatan Trans Nasional di Kota Semarang menurut Jenis dan Jumlahnya Tahun 2019-2020	22
Gambar 4.5	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana ( <i>Crime Clock</i> ) Tahun 2018-2020	25
Gambar 4.6	Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana ( <i>Crime Rate</i> ) Tahun 2018-2020	26

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Budaya politik berkaitan dengan kesadaran akan politik yang merupakan cerminan dari kesadaran politik suatu masyarakat terhadap sistem politik yang berlaku dalam suatu negara. Setiap masyarakat mempunyai kesadaran politik yang berbeda-beda, salah satunya tergantung pada latar belakang pendidikannya.

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Ilmu politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik dan merupakan cara agar peraturan-peraturan dapat diterima baik oleh masyarakat, untuk membawa masyarakat ke dalam suksesnya cita-cita bersama.

Menurut ahli politik *Rod Hague et al*, politik adalah kegiatan menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya.

Dalam dunia politik terdapat konsep-konsep dasar politik, menurut Miriam Budiharjo ada lima konsep dasar politik, yaitu:

#### 1. Negara

Negara merupakan inti dari politik karena negara merupakan tempat berpolitik, dimana didalamnya

terdapat masyarakat, politik mengatur bagaimana lembaga lembaga di dalam negara itu melakukan tugas dan fungsinya

2. Kekuasaan

Politik merupakan upaya di dalam memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan yang telah didapat.

3. Pengambilan keputusan

Politik terkait pada pengambilan keputusan yang dapat mengikat orang banyak.

4. Kebijakan umum

Dalam kehidupan bernegara, pastilah masyarakat mempunyai cita cita dan tujuan bersama, merasa senasib dan kemauan bersama. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan peraturan mengikat atau cara menuju semua itu, sehingga politik menjadi suatu cara mencapai kebijakan umum yang dianggap mampu mewakili aspirasi masyarakat bersama.

5. Pembagian

Pembagian yang dimaksud adalah pembagian atas nilai nilai dalam masyarakat. Sistem politik mengatur bagaimana nilai nilai itu diberikan.

Pemerintahan Orde baru mencanangkan berbagai konsep dan aktifitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas politik keamanan

merupakan syarat mutlak bagi pembangunan. Menurut *Seymour Martin Lipset* dalam buku *Political Man* mengatakan bahwa kestabilan sistem politik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam mempercepat implementasi kebijakan pendorong perekonomian suatu negara diperlukan stabilitas politik dan juga keamanan. Tumbuh kembangnya rasa aman pada suatu komunitas masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang ikut mempengaruhi pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Masyarakat yang kurang atau tidak memiliki rasa aman tidak akan mampu melakukan seluruh kegiatannya secara maksimal, bahkan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang pada gilirannya berpengaruh pada tingkat kesejahteraannya.

Salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "...Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...". Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Sejalan dengan itu, upaya untuk mewujudkan terciptanya situasi dan kondisi keamanan yang kondusif merupakan langkah strategis yang perlu terus menerus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil makmur.

Rasa aman mencakup aspek dan dimensi yang sangat luas, sehingga sulit diukur, sehingga rasa aman masyarakat biasanya diukur dari sisi yang berlawanan, yaitu dari banyaknya kejadian yang mengakibatkan masyarakat merasa tidak aman. Kejadian tersebut dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) disebut gangguan kamtibmas. Polri mengklasifikasikan gangguan kamtibmas kedalam dua kelompok, yaitu kejadian pidana atau kriminalitas (seperti pencurian, penipuan) dan kejadian bukan pidana (antara lain: kerusuhan dan konflik massal).

## **1.2. Tujuan**

Penyusunan publikasi Statistik Keamanan Kota Semarang 2020 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik politik dan keamanan secara berkala dan berkesinambungan yang dapat menggambarkan perkembangan politik dan keamanan di kota Semarang. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

secara menyeluruh.

### **1.3. Ruang Lingkup**

Publikasi ini menyajikan data tentang gambaran politik dan kejadian tindak kejahatan/kriminalitas yang terjadi di Kota Semarang.

<https://semarangkota.bps.go.id>

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam publikasi Statistik Keamanan Kota Semarang 2020 ini bersumber dari Survei Statistik Politik dan Keamanan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang. Narasumber Survei Politik dan Keamanan terdiri dari berbagai instansi terkait di Kota Semarang seperti : Polrestabes Kota Semarang, DPRD Kota Semarang, Kesbangpol Kota Semarang dan KPUD Kota Semarang.

#### **2.2. Metode Pengumpulan Data**

Penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kota Semarang 2020 ini dikumpulkan melalui kompilasi data dari hasil registrasi/catatan instansi terkait secara berjenjang. BPS Kabupaten/Kota mengumpulkan data dari instansi terkait. Selanjutnya data yang sudah masuk dari instansi terkait diolah menjadi tabel-tabel yang disajikan dalam lampiran pada publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kota Semarang 2020 ini.

Data yang disajikan adalah data tahun 2020 yang berisi kejadian selama tahun 2020.

## 2.3. Konsep dan Definisi

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini serta jenis sumber data yang menghasilkan data tersebut, konsep dan definisi serta terminologi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini juga merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan.

### 2.3.1. Konsep-Konsep Kriminalitas dalam Laporan dan Evaluasi

#### Situasi Kamtibmas.

**Tindak Pidana Kejahatan/Kriminalitas atau pelanggaran** merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

**Peristiwa yang dilaporkan** adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Kepolisian atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh Kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Kepolisian RI jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

**Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian**, adalah:

Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa. Dalam hal delik aduan,

pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang. Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichtmatigheid*. Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian. Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia. Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

**Pelaku Tindak Kriminalitas** adalah:

Orang yang melakukan tindak kriminalitas atau orang yang turut melakukan tindak kriminalitas atau orang yang menyuruh melakukan tindak kriminalitas atau orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak kriminalitas atau orang yang membantu untuk melakukan tindak kriminalitas.

**Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur:**

- Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.
- Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.
- Umum adalah anak-anak dan dewasa.

**Tahanan** adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang

dari 20 hari.

**Kerugian** adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

**Korban Kejahatan** adalah seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

**Selang Waktu Kejahatan (*Crime Clock*)** adalah selang waktu atau interval waktu terjadinya satu tindakan kejahatan dengan kejahatan yang lain. Selang waktu kejadian kriminal dinyatakan dalam satuan waktu detik. Semakin tinggi nilainya berarti kondisi kemandirian dan ketertiban masyarakat semakin membaik.

**Angka Kejahatan (*Crime Rate*) atau resiko Terkena Kejahatan** adalah jumlah kejahatan setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 100.000. Semakin tinggi angka kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah.

## **BAB III**

### **STATISTIK POLITIK**

#### **3.1. Pilkada Terakhir**

Kota Semarang menyelenggarakan Pilkada untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota periode 2016-2021 pada tanggal 9 Desember 2015. Dalam Pilkada tersebut terdapat 3 (tiga) kandidat yang ditetapkan oleh KPUD Kota Semarang, yaitu :

1. Soemarmo HS berpasangan dengan Zuber Safawi (Marmo-Zuber)
2. Hendrar Prihadi berpasangan dengan Hevearita Gunaryanti Rahayu (Hendi –Ita)
3. Sigit Ibnugroho berpasangan dengan Agus Sutiyoso (Sigit – Agus)

Adapun kandidat yang terpilih adalah Hendrar Prihadi dan pasangannya Hevearita Gunaryanti Rahayu yang diusung oleh partai politik PDIP, Nasdem dan Partai Demokrat dengan memperoleh 320.237 suara dari 690.694 suara sah atau 46,36 persen. Dari seluruh pemilih yang terdaftar ternyata yang menggunakan hak pilihnya hanya sekitar 62 persen sedangkan sekitar 34 persen tidak memberikan suara/golput. Berikut tabel perolehan suara masing masing kandidat dan asal partai politiknya.

**Tabel 3.1 Perolehan Suara Kandidat Kandidat dalam Pilkada  
Walikota-Wakil Walikota Semarang Tahun 2015**

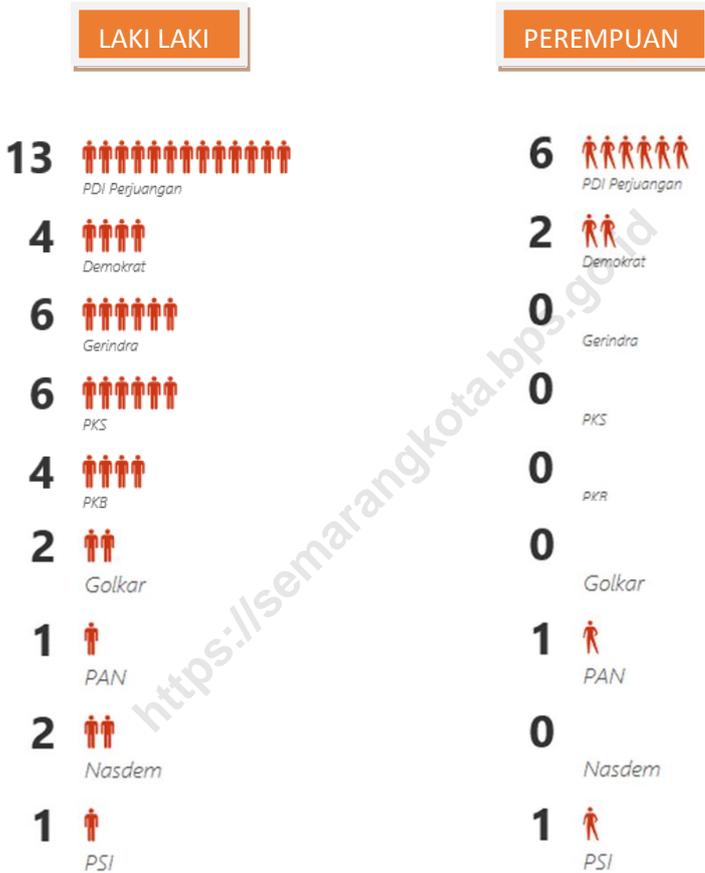
No	Kandidat	Partai	Suara	% Suara
1	Marmo-Zuber	PKB dan PKS	220.745	31,96
2	Hendi-Ita	PDIP, Nasdem, PD	320.237	46,36
3	Sigit -Agus	Gerindra, PAN, Golkar	149.712	21,68
Total Suara sah			690.694	62,28
Total Suara tidak sah/Golput			418.351	37,72
Pemilih terdaftar			1.109.045	

Sumber : KPUD Kota Semarang,2015

### 3.2. Susunan Anggota DPRD

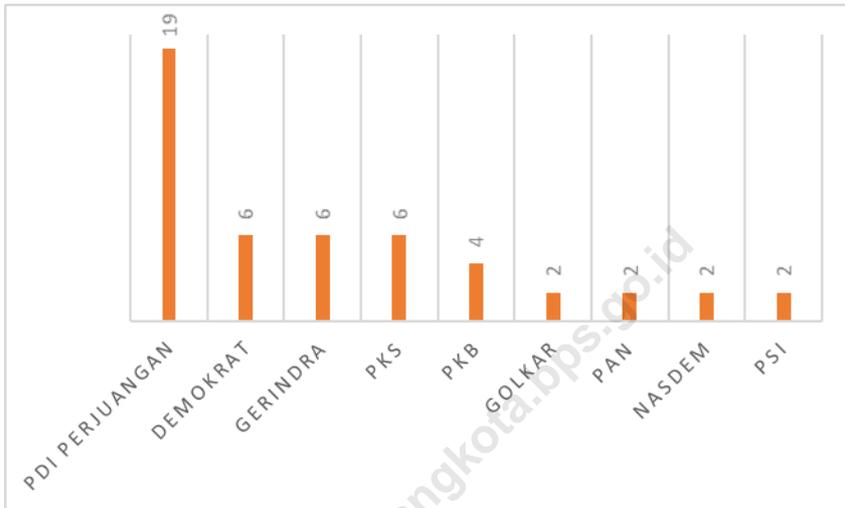
Anggota DPRD Kota Semarang periode 2019-2024 berdasarkan hasil Pemilu Legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2019 berjumlah 49 orang yang berasal dari 9 partai politik. Dari seluruh anggota DPRD, 38 persen berasal dari PDI Perjuangan, disusul terbesar kedua berasal dari Gerindra, Demokrat dan PKS yang masing masing sebanyak 12 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, sebanyak 80 persen berjenis kelamin laki laki dan 20 persen berjenis kelamin perempuan.

**Gambar 3.1 Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang  
periode 2019-2024 menurut Jenis Kelamin dan Asal Partai**



Sumber : DPRD Kota Semarang 2020

**Gambar 3.2 Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang  
periode 2019-2024 menurut Asal Partai**



Sumber : DPRD Kota Semarang 2020

### 3.3. Perda Yang Dihasilkan DPRD

Setiap tahun DPRD menghasilkan Perda atau Peraturan Daerah. Perda adalah Peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah/Walikota. Jumlah Perda yang dihasilkan tahun 2018 ada sebanyak 17 Perda, tahun 2019 ada sebanyak 8 Perda dan tahun 2020 ada sebanyak 5 Perda.

Meskipun dalam undang undang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD, akan tetapi DPRD juga memiliki hak untuk mengajukan rancangan Perda dan hak mengadakan perubahan terhadap rancangan

Perda, bahkan persetujuan tersebut mengandung kewenangan menentukan. Hak untuk mengajukan rancangan Perda disebut sebagai hak inisiatif. Sehingga DPRD atas inisiatif sendiri dapat menyusun dan mengajukan rancangan Perda. Pada tahun 2018 jumlah Perda inisiatif DPRD ada sebanyak 7 Perda, tahun 2019 ada sebanyak 4 Perda dan tahun 2020 ada 2 perda inisiatif yang diajukan.

**Tabel 3.2 Jumlah Perda dan Perda Inisiatif DPRD Kota Semarang tahun 2018-2020**

Peraturan	2018	2019	2020
Peraturan Daerah (Perda)	17	8	5
Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	7	4	2

*Sumber : DPRD Kota Semarang*

### **3.4. Organisasi Masyarakat (Ormas)**

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan persamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) sampai dengan tahun 2020 ada sebanyak 310 Ormas dimana 20 organisasi merupakan organisasi baru yang mendaftar di tahun 2020.

**Tabel 3.3 Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) yang  
Mendaftar dan Telah Terdaftar Kota Semarang  
tahun 2018-2020**

Keterangan Ormas	2018	2019	2020
Mendaftar Tahun ini	22	8	20
Total Terdaftar	282	290	310

*Sumber : Kesbangpol Kota Semarang 2018-2020*

### **3.5. Aparatur Kecamatan dan Kelurahan**

Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Jika dilihat berdasarkan keberadaan camat di kecamatan, pada tahun 2020 ada 1 kecamatan yang tidak memiliki camat, yaitu kecamatan Pedurungan. Dari 15 Camat, 14 diantaranya adalah laki laki dan 1 perempuan dan jika dipilah menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, 5 orang diantaranya berpendidikan DIV/S1 dan 10 orang berpendidikan S2.

Sedangkan untuk jabatan sekretaris kecamatan, masih ada 3 kecamatan yang belum memiliki sekretaris kecamatan, yaitu kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Gajahmungkur dan Kecamatan Tugu. Dari 13 Sekertaris Camat/Sekcam, 11 diantaranya adalah laki laki dan 2 perempuan dan jika dipilah menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, 9 orang diantaranya berpendidikan DIV/S1 dan 4 orang berpendidikan S2.

Untuk jabatan lurah, tahun 2020 terdapat 6 kelurahan yang

tidak memiliki lurah, yaitu kelurahan Patemon, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kelurahan Plombokan, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Tanjung Mas dan Kelurahan Bringin. Dari 173 lurah, 137 diantaranya berjenis kelamin laki laki dan 36 orang adalah perempuan, sedangkan jika dilihat menurut Pendidikan tertinggi, masih ada 4 orang yang berpendidikan SMU/ sederajat, 5 orang lulusan akademi, 127 orang S1 dan 37 orang berijazah S2.

Sekretaris kelurahan masih ada yang belum terpenuhi di 13 kelurahan dan dari seluruh sekretaris kelurahan yang ada, 86 diantaranya berjenis kelamin laki laki dan 77 diantaranya adalah perempuan. Jika dilihat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, 31 orang sekretaris lurah berpendidikan SMU/ sederajat, 10 orang lulus DIII, 107 orang lulus DIV/ S1 dan 15 orang berpendidikan S2.

**Tabel 3.4 Jumlah Aparatur Kelurahan menurut Jumlah, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi Tahun 2020**

Aparatur Kelurahan	Jumlah	jenis Kelamin		SMU/ Sederajat	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan		
		Laki-Laki	Perempuan		akademi /DIII	DIV/S1	S2
Lurah	173	137	36	4	5	127	37
Sekretaris Kelurahan	163	86	77	31	10	107	15

Sumber : PODES 2020

## BAB IV STATISTIK KEAMANAN

### 4.1. Jumlah Personil Kepolisian

Selama periode tahun 2018 - 2020, jumlah personil polisi menunjukkan tren yang menurun yaitu dari 2.393 polisi di tahun 2018 menjadi 2.228 polisi di tahun 2020.

Gambar 4.1 Jumlah Personil Kepolisian Menurut Jenis Kelamin

Tahun 2018-2020

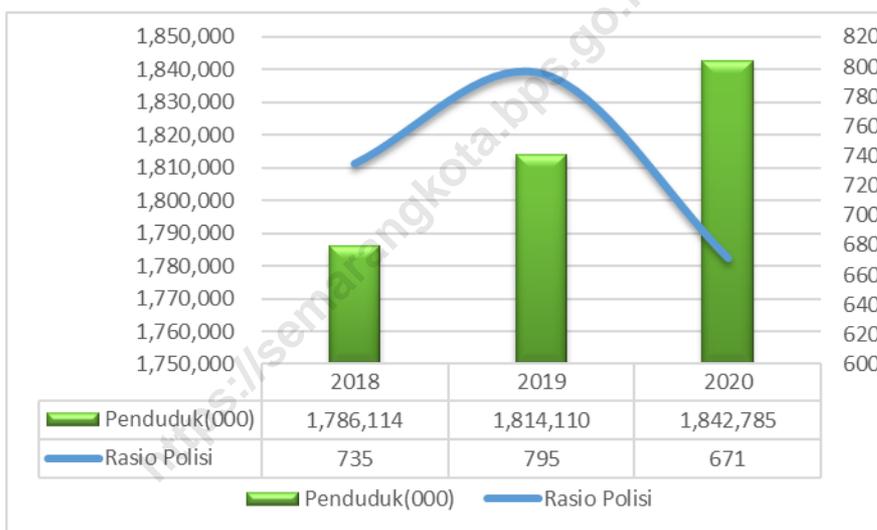


*Sumber : Polrestabes Kota Semarang*

Jumlah polisi yang tidak sebanding dengan penambahan penduduk akibatnya rasio polisi terhadap penduduk menjadi semakin besar. Rasio polisi adalah jumlah polisi dibandingkan

dengan jumlah penduduk suatu wilayah atau negara. Menurut PBB Rasio Polisi yang ideal adalah 1:400. Besar kecilnya Rasio Polisi menentukan efektifitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Semakin kecil Rasio Polisi maka semakin efektif pelayanan kepolisian terhadap masyarakat

Gambar 4.2 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2018-2020



Sumber : Polrestabes Kota Semarang

#### 4.2 Jumlah Kejahatan

Kejadian tindak pidana atau tindak kriminalitas di Kota Semarang menunjukkan tren yang *fluktuatif*. Jumlah kejadian tindak kriminalitas yang dilaporkan atau *crime total* tertinggi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir adalah pada tahun 2019

yaitu sebanyak 1.513 kejadian.

Berdasarkan jumlah tindak pidana yang dilaporkan atau *crime total* dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 maka jumlah kasus terbanyak yang berhasil diselesaikan atau *crime cleared* terjadi pada tahun 2019 yaitu terdapat 760 kasus dengan persentase atau *clearance rate* sebesar 50,51 persen. Namun *Clearance rate* tertinggi terjadi tahun 2020 sebesar 62,07 persen.

**Tabel 4.1**  
***Crime Total, Crime Cleared, dan Clearance Rate***

**Tahun 2018 - 2020**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b><i>Crime Total</i></b>	887	1.513	1.081
<b><i>Crime Cleared</i></b>	530	843	671
<b><i>Clearance Rate</i></b>	59,75	50,71	62,07

*Sumber : Polrestabes Kota Semarang*

#### **4.3. Jenis Kejahatan**

Dalam lembaga kepolisian kejahatan dikelompokkan dalam 4 jenis kejahatan yaitu kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan berimplikasi kontijesi. Kejahatan konvensional antara lain pencurian, penipuan, penjabretan, perampasan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Kejahatan transnasional bersifat lintas negara regional maupun internasional seperti terorisme. Sedangkan yang termasuk kejahatan terhadap

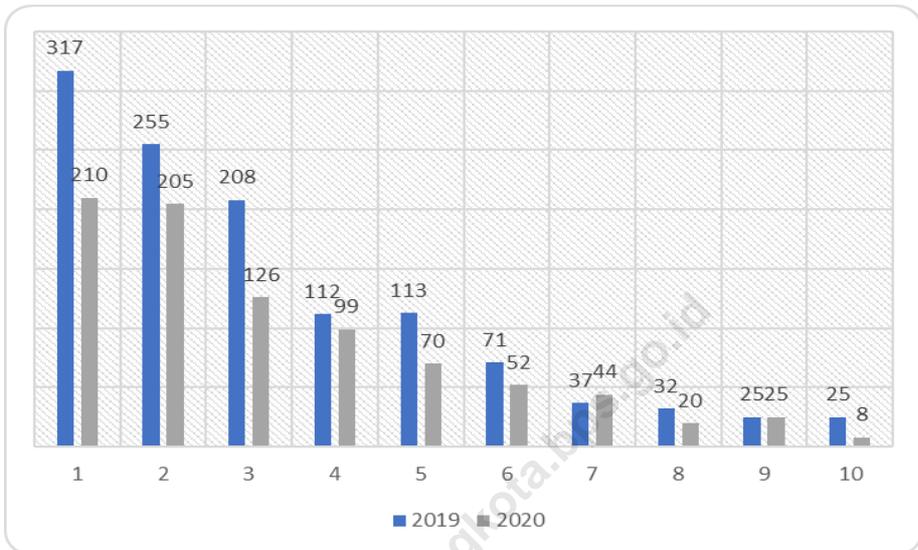
kekayaan negara adalah korupsi, *illegal logging* (pembalakan liar), *Illegal mining* (penambangan liar), penyalahgunaan BBM, *Illegal Fishing* (penangkapan ikan secara ilegal), perusakan lingkungan hidup dan penyelundupan.

Jenis kejahatan terjadi di wilayah Kota Semarang secara umum sangat beragam, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Tindak kriminalitas menurut jenis kasusnya yang paling sering terjadi setiap tahun di Kota Semarang adalah kejahatan konvensional. Dari sekian banyak jenis kejahatan konvensional, ada 10 jenis kejahatan konvensional yang paling sering terjadi di tahun 2020 yaitu pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), Narkotika, Penggelapan, Pencurian dengan pemberatan (Curat), penipuan/perbuatan curang, pencurian biasa (termasuk ringan), penganiayaan berat (anirat), kekerasan dalam rumahtangga (KDRT), pencurian dengan kekerasan (curas), penganiayaan ringan (Anira).

Selama tahun 2018-2020 jenis kejahatan konvensional yang paling banyak terjadi adalah pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) sebanyak 317 kasus di tahun 2019 dan berkurang di tahun 2020 menjadi 210 kasus. Kasus terbanyak kedua di tahun 2020 dari kejahatan konvensional adalah narkotika yaitu sebanyak 255 kasus di tahun 2019 dan 205 kasus di tahun 2020.

Secara umum, dari 10 kejahatan konvensional terbesar di Kota Semarang tahun 2020 menunjukkan tren menurun dibandingkan tahun 2019.

Gambar 4.3 10 Kejahatan Konvensional Terbesar di Kota Semarang Menurut Jenis dan Jumlahnya Tahun 2019-2020



Sumber : Polrestabes Kota Semarang

Keterangan:

1. Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)
2. Narkotika
3. Penggelapan
4. Pencurian dengan Pemberatan (Curat)
5. Penipuan/Perbuatan Curang
6. Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)
7. Penganiayaan Berat (Anirat)
8. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
9. Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)
10. Penganiayaan Ringan (Anira)

Jenis Kejahatan transnasional yang terjadi di kota Semarang selama kurun waktu 2019-2020 adalah *cyber crime* dan perbankan. Berikut jenis kejahatan trans nasional yang terjadi di kota Semarang tahun 2019-2020

Gambar 4.4 Kejahatan Trans Nasional di Kota Semarang menurut Jenis dan Jumlahnya Tahun 2019-2020



Sumber : Polrestabes Kota Semarang

Kejahatan terhadap kekayaan negara yang terjadi di kota Semarang ada 2 jenis yaitu korupsi dan penggelapan. Jumlah kasus penggelapan terjadi sebanyak 208 kasus di tahun 2019 dan menurun menjadi 126 kasus di tahun 2020, sedangkan kasus korupsi terjadi 1 kasus di tahun 2019 dan ditahun 2020 tidak ada laporan kasus korupsi.

#### 4.4. Korban Kejahatan

Korban kejahatan merupakan pihak yang menderita kerugian baik secara fisik, psikis maupun materi ketika terjadi tindak kejahatan. Secara umum jumlah korban kejahatan di tahun 2018 dan 2020 dari setiap jenis tindak kejahatan berjenis kelamin laki laki kecuali untuk tindak kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dimana jumlah korban di tahun 2019 ada 32 orang perempuan dan di tahun 2020 ada 20 orang perempuan. Secara umum jumlah korban laki laki dibandingkan jumlah korban perempuan adalah 1:4 orang

Jika dipilah menurut jenis kelamin dan kejahatannya, korban kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yaitu dari 317 korban di tahun 2020, 300 diantaranya adalah laki laki dan 17 orang perempuan. Kemudian untuk korban jenis kejahatan narkoba seluruhnya adalah laki laki demikian juga jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan (Curas).

Untuk Kasus Penggelapan jumlah korban laki laki adalah 111 orang dan 15 orang perempuan, korban dari penggelapan terdiri dari perorangan dan organisasi/ institusi. Korban dari organisasi/institusi adalah pelapornya.

**Tabel 4.2 Jumlah Korban Kejahatan menurut Jenis Kejahatan di Kota Semarang Tahun 2019-2020**

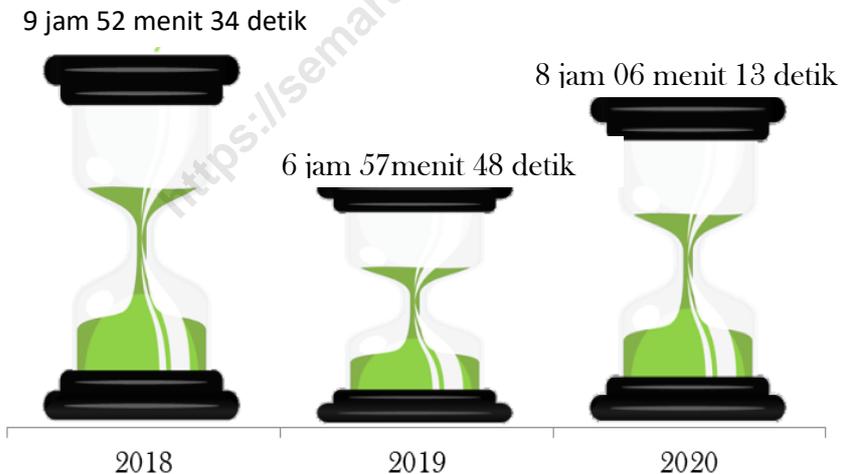
Jenis Kejahatan	Jumlah Korban Kejahatan			
	2019		2020	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
<b>Kejahatan terhadap nyawa</b>				
Pembunuhan	4	0	0	2
<b>Kejahatan terhadap fisik/badan</b>				
Penganiayaan Ringan (Anira)	23	2	3	5
Penganiayaan Berat (Anirat)	30	7	34	10
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0	32	0	20
<b>Kejahatan terhadap kesusilaan</b>				
Perkosaan	0	3	0	2
<b>Kejahatan terhadap Hak Milik/Brang dengan penggunaan kekerasan</b>				
Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	25	0	19	6
<b>Kejahatan terhadap hak milik</b>				
Pencurian	66	3	38	14
Pencurian dengan pemberatan	108	4	65	34
Pencurian kendaraan bermotor	300	17	154	56
Pengrusakan/penghancuran barang	12	0	3	0
Pembakaran dengan sengaja	17	2	2	0
<b>Kejahatan terkait Narkotika</b>				
Narkotika dan psicotropika	255	0	205	0
<b>Kejahatan terkait penipuan, penggelapan dan korupsi</b>				
Penipuan/perbuatan curang	101	12	51	19
Penggelapan	167	41	111	15
Korupsi	1	0	0	0

Sumber : Polrestabes Kota Semarang

#### 4.5 Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*)

Selang waktu terjadinya tindak pidana (*Crime Clock*) menunjukkan pada beberapa kali kejahatan yang terjadi pada setiap jam. Dalam waktu 3 tahun terakhir selang waktu terjadinya tindak terlihat fluktuatif, yaitu 9 jam 52 menit 34 detik di tahun 2018 menjadi 6 jam 57 menit 48 detik di tahun 2019 kembali mengalami percepatan di tahun 2020 menjadi 8 Jam 06 menit 13 detik yang berarti dalam kurun waktu tersebut terjadi satu kali tindak kejahatan.

**Gambar 4.5 Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*)  
Tahun 2018-2020**



Sumber : Polrestabes Kota Semarang

#### 4.6. Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*)

Seperti halnya crime clock, crime rate di Kota Semarang tahun 2017-2020 menunjukkan pola yang fluktuatif . Di tahun 2018 crime rate kota Semarang sebesar 30 jiwa yang berarti setiap 100.000 penduduk kota Semarang ada sekitar 30 orang yang menjadi korban tindak pidana. Angka ini menurun di tahun berikutnya menjadi 29 jiwa di tahun 2019 dan kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 41 jiwa di tahun 2020.

**Gambar 4.6 Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*)  
Tahun 2018-2020**



*Sumber : Polrestabes Kota Semarang*

#### **4.7. Tindak kejahatan yang terjadi di kelurahan selama setahun terakhir**

Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa tahun 2020 terkait tindak kejahatan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir, tindak kejahatan yang tercatat di kelurahan adalah perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan dan penyalahgunaan/peredaran nsrkoba.

Kasus perkosaan selama tahun 2020 tercatat ada 1 kasus di kelurahan Sendangguwo kecamatan Tembalang. Sedangkan penyalahgunaan/peredaan narkoba terjadi sebanyak 21 kasus yang tersebar di 8 kecamatan dan 20 kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Banyumanik : Kelurahan Pedalangan
2. Kecamatan Gajahmungkur : Kelurahan Gajahmungkur
3. Kecamatan Candisari : Kelurahan Jomblang, Candi, Tegalsari
4. Kecamatan Tembalang : Kelurahan Sendangguwo
5. Kecamatan Genuk : Kelurahan Genuksari dan Kelurahan Banjardowo
6. Kecamatan Semarang Timur : Kelurahan Rejosari, Bugangan, Mlatibaru, Kemijen
7. Kecamatan Semarang Barat : Kelurahan Kembangarum, Manyaran, Bojongsalaman, Ngemplaksimongan, Kalibanteng Kulon

8. Kecamatan Ngaliyan : Kelurahan Wates, Bringin,  
Wonosari

#### **4.8. Kegiatan Warga/Kelurahan Untuk Menjaga Keamanan**

##### **Lingkungan**

Meskipun pemerintah telah mengerahkan aparat aparat penegak hokum seperti polisi dan tantara untuk menjamin keamanan seluruh warga negaranya, namun setiap orang tetap memiliki tanggungjawab terhadap keamanan lingkungan masing masing.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh warga desa/kelurahan dalam menjaga keamanan lingkungan desa/kelurahan selama setahun terakhir antara lain : Pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan, pembentukan/pengaturan regu jaga, penambahan jumlah anggota hansip/linmas, pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan dan pengaktifan sistem keamanan lingkungan yang berasal dari inisiatif warga.

Kegiatan yang paling banyak dilakukan warga untuk menjaga keamanan dalam setahun terakhir adalah pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan yang dilakukan oleh 171 kelurahan, kegiatan terbanyak kedua adalah pengaktifan sistem keamanan lingkungan yang berasal dari inisiatif warga yaitu dilakukan di 170 kelurahan. Sedangkan yang jarang sekali dilakukan adalah penambahan jumlah hansip/linmas yang hanya dilakukan di 45 kelurahan. Keterangan lebih lengkap dapat dilihat ditabel dibawah ini.

**Tabel 4.3. Kegiatan Warga desa/Kelurahan untuk Menjaga Keamanan Lingkungan selama setahun terakhir dan Jumlah Kelurahan yang melaksanakan selama Tahun 2019/2020**

<b>No</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Jumlah kelurahan yang melaksanakan</b>
<b>1</b>	Pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan	145
<b>2</b>	pembentukan/pengaturan regu jaga	137
<b>3</b>	penambahan jumlah anggota hansip/linmas	45
<b>4</b>	pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan	171
<b>5</b>	pengaktifan sistem keamanan lingkungan yang berasal dari inisiatif warga.	170

Sumber : PODES 2020

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam bidang politik, proporsi perempuan dalam parlemen di kota Semarang hanya sebesar 20,4 persen yang artinya kuota 30 persen perempuan dalam parlemen belum terpenuhi.

Dalam bidang keamanan di Kota Semarang tahun 2018-2020 , kejahatan yang terjadi menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan tingkat penyelesaian yang berbeda pula. Tingkat kejahatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan jumlah kasus yang terselesaikan sebesar 50,71 persen sedangkan terendah terjadi pada tahun 2018 dan bisa terselesaikan 59.75 persen.

Tindak pidana yang menonjol terhadap fisik manusia adalah penganiayaan berat (Anirat). Dan pada tindak pidana terhadap hak milik (barang) adalah Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Sementara kejahatan transnasional terbanyak adalah *cyber crime* dan kejahatan terhadap kekayaan negara terbanyak adalah kasus korupsi

Mengingat kejadian kriminal yang terjadi pada kurun waktu tersebut yang menyangkut orang maupun barang serta pelaku tindak pidana maka diperlukan upaya bersama untuk lebih menekan kejadian tindak pidana maupun penyelesaian. Serta pembinaan bagi warga masyarakat untuk lebih menjaga lingkungan dan situasi terutama keluarga, sehingga pelaku kriminal anak-anak tidak ada lagi atau paling tidak semakin jauh berkurang .

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<https://semarangkota.go.id>

